

SINOPSIS

Kantor Pertanahan dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat banyak menghadapi kendala. Kendala tersebut antara lain berupa volume pekerjaan yang tinggi, keterbatasan aparat dan sistem pembukuan daftar isian yang rumit. Untuk itu diperlukan suatu sistem kerja yang mampu membentuk suatu tata kerja yang efektif dan efisien untuk memperlancar jalannya pelayanan tersebut. Sehingga untuk mempermudah jalannya pelayanan maka program *Land Office Computerization* (LOC) ini dirancang. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas program LOC di BPN Sleman, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi tersebut.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan dasar pokok pemikiran teori implementasi kebijakan Edward III untuk mengamati dan menganalisa semua hal yang bersangkutan dengan implementasi program LOC tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data digunakan metode wawancara, pengamatan, studi dokumentasi, dan catatan lapangan. Informasi utama berasal dari administrator dan pejabat struktural. Informasi selanjutnya berasal dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, baik yang terlibat sebagai petugas LOC maupun bukan petugas LOC.

Dari hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa faktor kelembagaan, teknologi, serta sumber daya manusia. Produktivitas sebelum dilaksanakan LOC lebih rendah daripada produktivitas setelah dilaksanakan LOC. Dengan perbandingan jumlah sertifikat yang dihasilkan sebesar 11% tiap tahunnya. Tetapi hal ini hanya bisa memberi kepuasan kepada pengguna pelayanan saja, tidak bisa mengatasi kendala-kendala yang ada pada saat Phase I sampai IIa. Dan apabila semua kendala yang ada pada saat ini dihiraukan, maka nantinya akan merusak sistem pelayanan itu sendiri. Maka berbagai upaya banyak dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan tentang komputer kepada seluruh pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara garis besar kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada saat Phase I dan Phase IIa relatif sama, yaitu: kurangnya tenaga terampil untuk menangani sistem jaringan seandainya ada kerusakan, dan penempatan pegawai yang telah mengikuti aplikasi LOC belum diperhatikan; terdapat dualisme dalam struktur birokrasi; terdapat ketidak siapan dan kegagapan teknologi dalam mengimplementasikan LOC pada tingkat operasional; dan sulitnya mendapat aplikasi dalam penambahan program pelayanan. Sehingga saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah perlu adanya restrukturisasi organisasi dan memikirkan jenjang karier para petugas LOC sehingga tidak seolah-olah setelah bertugas di LOC jenjang karier menjadi terhambat; perlu dipersiapkan secara khusus berkaitan dengan infra dan suprastruktur yang berhubungan dengan teknologi LOC, agar masa transisi penerapan LOC tidak memunculkan persoalan baru